



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Isu-isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	6
1.6 Peta Proses Bisnis	6
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Tujuan dan sasaran	11
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS	21
3.1 Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	23
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	29
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra	33
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)	36
3.5 Akuntabilitas keuangan	36
3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran	39
3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya	41
3.8 Prestasi dan Penghargaan	44
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR LAMPIRAN.....

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
5. Penghargaan (jika ada)

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
Tabel1.1 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada Tahun 2023	ii
Tabel1.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2023	ii
Tabel1.3 Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	ii
Tabel1.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023	ii
Tabel1.5 Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023	ii
BAB I PENDAHULUAN	
TABEL 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	7-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS	
TABEL 2.2 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023	12
TABEL 2.3.1	14
TABEL 2.3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai	17
TABEL 2.4.1 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023	18
TABEL 2.4.2 Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai	19
TABEL 2.4.3 Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS	
TABEL 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
TABEL 3.2 Atribut Capaian Indikator Kinerja	23
TABEL 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	24
TABEL 3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	29
TABEL 3.4.1 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	36
TABEL 3.5.1 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	37
TABEL 3.8 Prestasi dan Penghargaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Link Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4
Gambar 1.5	Link Cascading Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	5
Gambar 1.6	Link Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	5
Gambar 2.1	Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan Bidang Perindustrian Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota DumaiJanuari 2024
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai maka sebagai unsur teknis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menjalankan fungsi :

1. Pelaksanaan Kewenangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
2. Perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
3. Pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaran hasil usaha koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
5. Peminaan dan pengawasan penyelenggaraan koperasi, pengusaha kecil dan menengah; dan

6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 1 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri “ dan SASARAN yang ke 1 dan 2 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM “ *dan* “Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (Dua) Tujuan dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 6 (Enam) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 31 (Tiga puluh satu) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 5 Sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 1 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 1 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan 1 sub kegiatan :
 - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi

1. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan 1 sub kegiatan :
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.

IV. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan 3 sub kegiatan :
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

V. Program Pengembangan UMKM

1. Kegiatan Pengembangan Usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan 1 sub kegiatan :
 - Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

VI. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
 - Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : (apabila mengalami perubahan)

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	70,58%
		Persentase Usaha Mikro Kecil	45 %
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	63,9%
		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	13%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp. 6.168.533.892,00 (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Ratus Dua Rupiah)* untuk melaksanakan 6 (Enam) Program Kerja antara lain :

Tabel 1.2
Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.463.540.612,00	APBD
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 94.847.200,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 480.146.080,00	APBD
5.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 0,00	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 30.000.000,00	APBD
J U M L A H		Rp. 6.168.533.892,00	APBD

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.210.455.282,00	APBD
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 185.128.000,00	APBD
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 100.000.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 2.073.834.100,00	APBD
5.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 130. 410.000,00	APBD
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 30.000.000,00	APBD
J U M L A H		Rp. 8.729.827.382,00	APBD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	70,58 %	65,16 %	92,32%	Sangat Berhasil	-	-	-
		Persentase Usaha Mikro Kecil	45 %	22,13%	49,18%	-	-	-	Tidak Berhasil
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	63,9%						
		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	13%	4,33%	33,31 %	-	-	-	Tidak Berhasil

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 55% s.d < 70% (Cukup Berhasil) yaitu Cukup Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.729.827.382 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari

BELANJA OPERASI sebesar Rp. 8.672.547.382 (Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 57.280.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

1. Belanja Operasi	:	Rp.	8.672.547.382,00
2. Belanja Modal	:	Rp.	57.280.000,00
J u m l a h	:	Rp.	8.729.827.382,00

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera							
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat kota Dumai	Persentase Koperasi Aktif	70,58%	65,16%	92,32%			
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	45%	22,13%	49,17%			
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	100%	100%	100%	6.210.455. 282	5.790.388. 484	93,24
Program Pengawasan dan	Persentase Pemeriksaan	35,5%	36,13%	101,77%	185.128. 000	183.965 .945	99,37

Pemeriksaan Koperasi	dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota						
Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,5%	49,03%	138,11%	100.000.000	96.725.298	96,73
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	15%	13,67%	91.13%	2.073.834.100	1.855.010.480	89,45
Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dibina	4%	4%	100%	130.410.000	130.253.000	99,88
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera							
Sasaran : Meningkatkan Perekonomian dan Daya saing daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	63,90%	7,72%	12,08%	-	-	-
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	13%	4,33%	33,08%			
Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Terselenggaranya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi perda	75%	40%	53,33%	30.000.000	29.970.000	99,90

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera	Persentase Koperasi Aktif	92,32%	99,37%	SANGAT EFISIEN	
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	49,17%	89,45%	SANGAT EFISIEN	
2.	Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	12,08%	0%	KURANG EFISIEN	Karena Tidak Didukung Oleh anggaran
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	33,08%	99,90%	SANGAT EFISIEN	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi Aktif* yaitu 2 (dua) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran Rp. 185.128.000 dengan realisasi Rp. 183.965.945 atau 99,37% tingkat efisiensinya adalah 102,42 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (101,77%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,37%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk

dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

- Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran *Rp.185.128.000* dengan realisasi *Rp. 183.965.945* atau 99,37 %
 - ❖ Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar *Rp. 185.128.000* dengan realisasi *Rp. 183.965.945* atau 99,37%. Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran gaji penyuluh atau pendamping koperasi sebanyak 5 (lima) orang yang wilayah kerjanya di 7 (tujuh) kecamatan se Kota Dumai, Pembinaan langsung kepada koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pemeriksaan dan Pengawasan langsung ke lokasi terhadap koperasi di 7 (tujuh) Kecamatan se Kota Dumai sebanyak 56 (lima puluh enam) koperasi, Pembinaan langsung ke lokasi terhadap koperasi sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di 7 (tujuh) Kecamatan se Kota Dumai sebanyak 56 (lima puluh enam) koperasi, dan sosialisasi penguatan kelembagaan kesehatan koperasi tentang perizinan usaha dan perundang-undangan bagi koperasi sektor TKBM dan usaha simpan pinjam sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta dari pengurus/pengelola koperasi.
2. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dengan anggaran *Rp. 100.000.000* dengan realisasi *Rp. 96.725.298* atau 96,73% tingkat efisiensinya adalah 142,78 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (138,11%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,73%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

- Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran *Rp. 100.000.000* dengan realisasi *Rp. 96.725.298* atau 96,73%
- ❖ Sub Kegiatan : Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya dengan anggaran *Rp. 100.000.000* dengan realisasi *Rp. 96.725.298* atau 96,73% . Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelatihan dasar koperasi terhadap pengurus/pengelola koperasi dan pelaku usaha UP2K dibawah binaan PKK Kota Dumai sebanyak 100 (seratus) orang, dan pelatihan teknik Quilting terhadap pengurus/pengelola koperasi dan pelaku usaha UP2K dibawah binaan PKK Kota Dumai sebanyak 52 (lima puluh dua) orang.

2. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Usaha Mikro dan Kecil yaitu 2 (dua)*

Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dengan anggaran *Rp.2.073.834.100* dengan realisasi *Rp.1.855.010.480* atau 89,45% tingkat efisiensinya adalah 101,88 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (91.13%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,45%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;
 - Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemiudahan Perizinan, Penguatan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan anggaran *Rp. 2.073.834.100* dengan realisasi *Rp. 1.855.010.480* atau 97,10%
 - ❖ Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran *Rp.1.705.474.100* dengan realisasi *Rp. 1.645.650.480* atau 98,94%

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan usaha mikro dengan anggaran *Rp.159.000.000* dengan realisasi *Rp. 158.728.060* atau 99,83%.
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dengan anggaran *Rp. 209.360.000* dengan realisasi *Rp. 209.360.000* atau 100%.

2. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran *Rp.130.410.000* dengan realisasi anggaran *Rp.130.253.000* atau 99,88% tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Kecil dengan anggaran *Rp.130.410.000* dengan realisasi anggaran *Rp.130.253.000* atau 99,88%.
- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan anggaran *Rp.130.410.000* dengan realisasi anggaran *Rp.130.253.000* atau 99,88%.

3. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB* yaitu tidak ada anggaran yang mendukung indikator tersebut tingkat efisiensinya adalah 0 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (12,08%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (0%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**; dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung indikator tersebut.

4. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 1 (satu) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90% tingkat efisiensinya adalah 33,11 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (33,08%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**;

- Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90%
- ❖ Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90%.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dmai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Perindustrian, yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pelaksanaan Kewenangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ;
2. Perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
3. Pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaran hasil usaha koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
5. Peminaan dan pengawasan penyelenggaraan koperasi, pengusaha kecil dan menengah; dan
6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - Subbagian Tata usaha;
- c. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

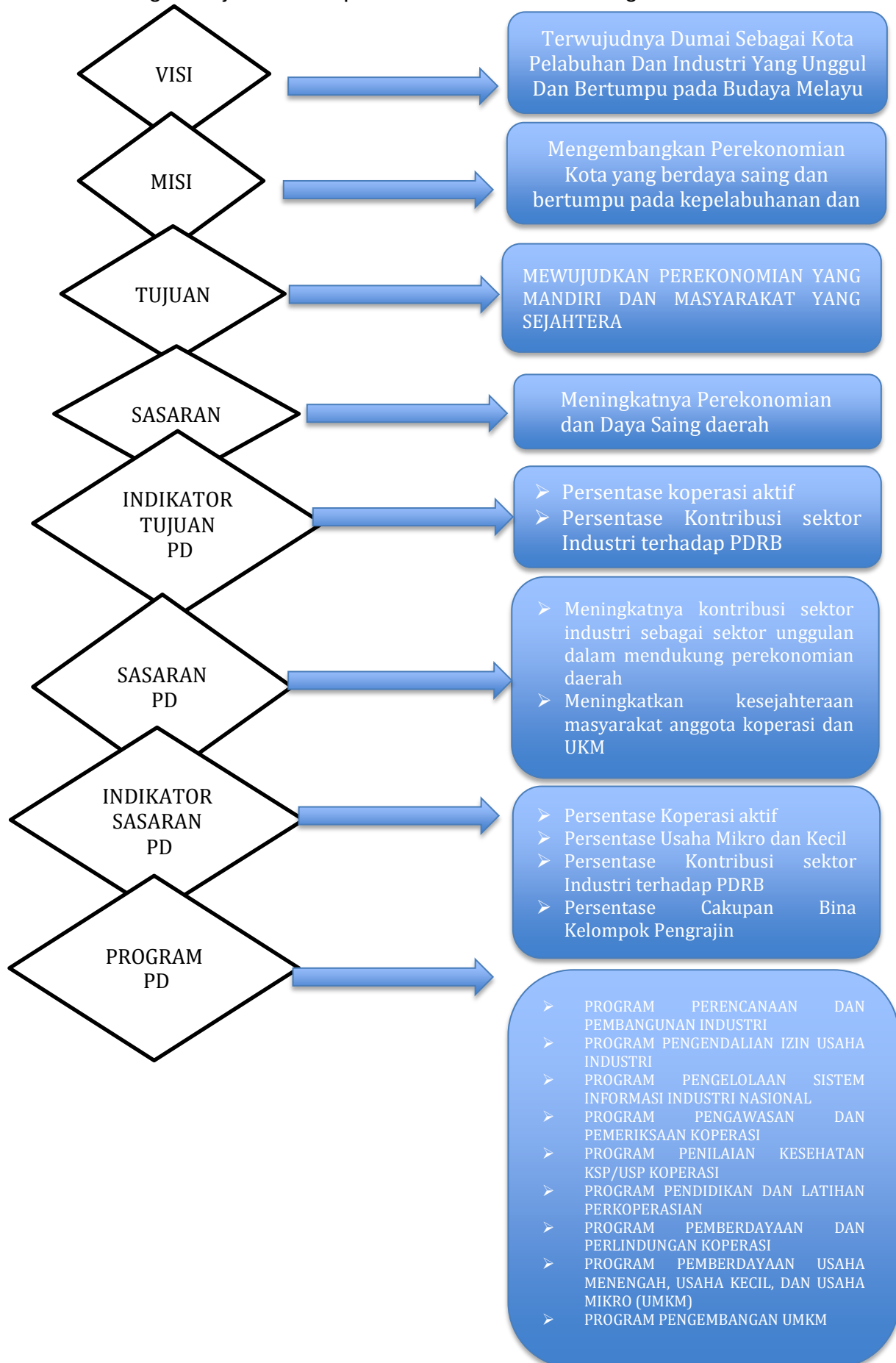
Isu strategis terkait dengan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan yang perlu ditangani sbb:

1. Memperkuat koperasi dalam mendukung UMKM
2. Memperkuat UMKM melalui peningkatan kualitas SDM, networking, permodalan dan Daya saing produk
3. Meningkatkan peran sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

1.5 Cascading Kinerja

Gambar I.2

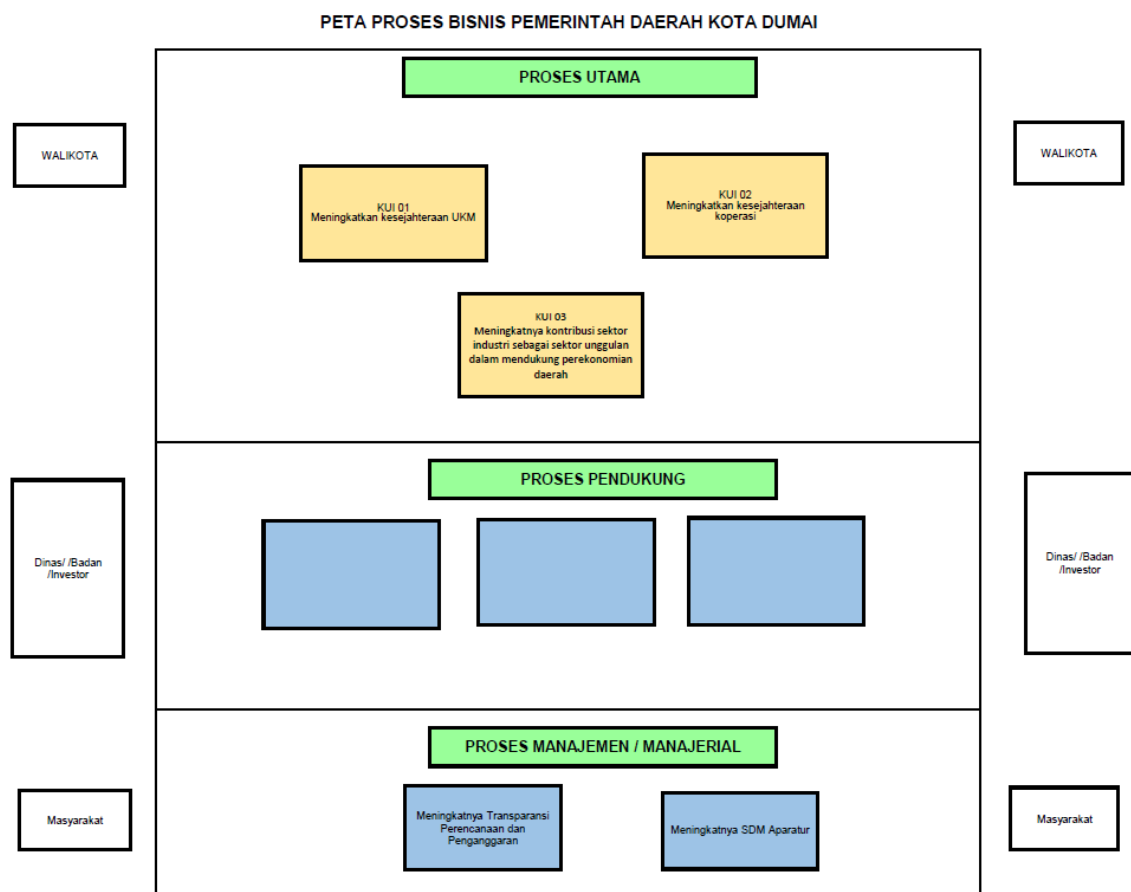
Cascading Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian



1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana skema Peta Proses Bisnis Terlampir:

GAMBAR I.3



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1303.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.7.1

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sudah menyusun crosscutting Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, akan tetapi belum mengacu permendari yang telah ditetapkan oleh PANRB.	Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan menyusun crosscutting Perangkat Daerah
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sudah sudah menuangkan realisasi rencana aksi dalam monev Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah dan perindustrian, akan tetapi belum disosialisasikan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan menuangkan realisasi Rencana Aksi dalam Monev Rencana Aksi tahun 2023 hingga per Triwulan II
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sudah melampirkan tabel evaluasi renstra 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah dan perindustrian, akan tetapi belum disosialisasikan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan membuat dan melampirkan tabel evaluasi renstra PD atau tabel pengendalian (dalev. Renstra) Perangkat Daerah 2021-2026 dan
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sudah melampirkan evaluasi kinerja pada Ekinerja akan tetapi belum disosialisasikan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan melampirkan hasil evaluasi kinerja pada Ekinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP Individu (sampel satu bulan)

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tab 1.7.2

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah menyusun crosscutting sebagaimana terlampir pada laporan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023, namun oleh karena hasil evaluasi Inspektorat hal ini belum sempurna, maka akan kami tidaklanjuti sebagaimana mestinya.	-
2.	Realisasi rencana aksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sudah dituangkan dalam monev rencana aksi tahun 2023 hingga per triwulan II s/d IV	-
3.	Tabel Evaluasi Renstra Perangkat Daerah atau tabel Pengendalian (dalev renstra) perangkat daerah 2021-2026 sudah dibuat dan dilampirkan dalam evaluasi Implementasi SAKIP	-
4.	Hasil Evaluasi kinerja pada e-kinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP individu (sampel satu bulan) sudah dilampirkan dalam evaluasi implementasi SAKIP	-

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

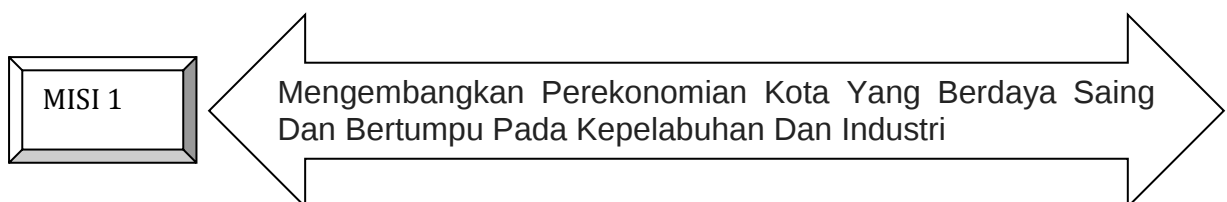
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	Persentase koperasi yang aktif	70,85%	Meningkatka kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase koperasi yang aktif	70,58%
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	45%
2. Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	63,9%	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	63,9%
				Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	13%

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat Yang sejahtera	1.1 Meningkatnya Perekonomian dan Daya saing daerah	1.1.1 Peningkatan Perekonomian kota Melalui Optimalisasi peran seluruh stake holder	1.1.1 Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan

		1.1.2 Peningkatan Produktivitas masyarakat	1.1.2.1 Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			1.1.2.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
			1.1.2.3 Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		1.1.3 Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	1.1.3.1 Mewujudkan kelembagaan yang tanggap untuk kemajuan investasi Dumai
			1.1.3.2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
	1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.2 Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	1.2.2.1 Meningkatkan penyaluran tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industry yang memadai

			1.2.2.2 Memantapkan Implementasi kebijakan, strategi dan program – program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industry didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
--	--	--	---

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	1. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	70,58% 45 %
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	1. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	63,9% 13%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp. 8.729.827.382 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)* untuk melaksanakan 6 (enam) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.4.2
Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.463.540.612,00	APBD
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 94.847.200,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 480.146.080,00	APBD
5.	Program Pengembangan UMKM	Rp.0,00	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 30.000.000,00	APBD
J U M L A H		<i>Rp. 6.168.533.892,00</i>	APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.3
Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.210.455.282,00	APBD
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 185.128.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 2.073.834.100,00	APBD
5.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 130. 410.000,00	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 30.000.000,00	APBD
J U M L A H		Rp. 8.729.827.382,00	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:
 - a. Rumus :
$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai telah menetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 3.1.1 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	62,5%	91,20%	70,58%	65,16%	92,32%	Sangat Berhasil
		Persentase Usaha Mikro Kecil	25,79%	73,68%	45 %	22,13%	49,17%	Tidak Berhasil
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	6,56%	10,59%	63,9%	7,72%	12,08%	Tidak Berhasil
		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	0	0	13%	4,33%	33,31%	Tidak Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Koperasi Aktif
 - a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Koperasi Aktif menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 70,58% realisasi sebesar 65,16% tercapai Sedang atau bernilai kinerja $66 \leq 75$ (sedang). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 62,5% atau tercapai sebesar 91,20%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 92,32%

- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Koperasi Aktif sesuai yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan terhadap Koperasi di Kota Dumai
 - Melakukan Pelatihan dan sosialisasi penguatan kelembagaan kesehatan koperasi tentang perizinan usaha dan perundang-undangan bagi koperasi dan pengurus/pengelola
 - Melakukan Pelatihan Dasar kopersi terhadap pengurus/pengelola koperasi dan pelaku usaha UP2K dibawah binaan PKK Kota Dumai
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi Aktif adalah sebagai berikut:
- Masih ada pengurus koperasi yang belum mentaati/mematuhi ketentuan tentang kelembagaan koperasi.
 - Masih ada pengurus koperasi yang belum menguasai tentang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan koperasi dan manajemen kepengurusan sehingga berdampak kepada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi serta lambatnya pengembangan usaha koperasi.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Koperasi Aktif adalah sebagai berikut:
- Perlu Bimbingan secara rutin dan berkala terhadap koperasi yang ada di Kota Dumai serta perlu adanya penganggaran yang lebih untuk pemeriksaan dan pengawasan koperasi serta pembinaan kepada koperasi yang ada di Kota Dumai.

2. Indikator Persentase Usaha Mikro Kecil

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Usaha Mikro Kecil menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 45% realisasi sebesar 22,13% tercapai Sangat rendah atau bernilai kinerja ≤ 50 (sangat rendah). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 25,79% atau tercapai sebesar 73,68%, maka capaian tahun 2023 menurun/meningkat sebesar 49,17%.
- b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Kinerja sasaran Persentase Usaha Mikro Kecil kurang melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Memberikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Dumai, memberi dukungan para Pelaku Usaha Mikro agar dapat melanjutkan aktifitas usaha dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro dalam menghadapi dampak Pandemi COVID-19 yang digunakan untuk modal usaha meliputi Pembelian Bahan Baku dan Bahan Penolong, Tempat Usaha, Peralatan, Kemasan, Promosi dan/atau Pemasaran.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:
 - Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang. Dan dengan adanya serangan pandemi covid 19 telah memicu perubahan perekonomian terutama terhadap bisnis UMKM, bukan hanya pada aspek produksi dan pendapatan saja, namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Usaha Mikro Kecil adalah sebagai berikut:
 - Memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro

3. Indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 63,9% realisasi sebesar 7,72% tercapai 12,08% atau bernilai kinerja ≤ 50 (sangat rendah). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 6,56% atau tercapai sebesar 10,59%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 12,08%.
- b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Penyebab keberhasilan nilai produk domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan adalah tingginya tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha baru
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB adalah sebagai berikut:
 - Penyebab kegagalan dari capaian indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB disektor industri pengolahan adalah tidak adanya atau kurangnya perkembangan dan pertumbuhan usaha baru.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB.adalah sebagai berikut:
 - Solusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai selaku organisasi perangkat daerah Kota Dumai dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
 - ❖ Memudahkan akses dalam berusaha
 - ❖ Memudahkan akses dalam permodalan
 - ❖ Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dalam menumbuh kembangkan usaha agar tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha baru meningkat
 - ❖ Indikator tersebut tidak didukung oleh anggaran

4. . Indikator Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 13% realisasi sebesar 4,33 % tercapai Sangat Rendah atau bernilai kinerja ≤ 50 (sangat rendah). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0% atau tercapai sebesar 0%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 33,08%
- b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin sesuai yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan Monitoring untuk Pelatihan Handcraft (lidi sawit) yang mana kelompok sasaran adalah masyarakat kurang mampu dan berdampak stunting.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin adalah sebagai berikut:
 - Masih Banyaknya Masyarakat yang terdampak stunting
 - Masih kurangnya anggaran yang dibutuhkan.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin adalah sebagai berikut:
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai harus melakukan Monitoring kelapangan dan masih kurangnya informasi kepada masyarakat tentang gedung UPT. Latihan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri sebagai wadah untuk pelaksanaan pelatihan kerajinan di Kota Dumai serta perlunya tambahan anggaran yang lebih untuk kegiatan pelatihan handcraft (lidi sawit) yang mana kelompok sasarannya adalah masyarakat kurang mampu dan berdampak stunting di Kota Dumai.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	68,53%	70,58%	62,5%	65,16%	91,20%	92,32%
		Persentase Usaha Mikro Kecil	35%	45%	25,79%	22,13%	22,13%	49,17%
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	61,9 %	63,9%	6,56%	7,72%	10,60%	12,08%
		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	9%	13%	0%	4,33 %	0%	33,08%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase Koperasi Aktif dengan target pada tahun 2022 adalah 68,53% berasal dari perhitungan Jumlah Koperasi Aktif dibagi dengan Jumlah Seluruh Koperasi dikali 100.
 - b. Pada tahun 2022 Jumlah Koperasi di Kota Dumai berjumlah 288 Koperasi berdasarkan rekapitulasi data keragaan Koperasi Kota Dumai, dan jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 sebesar 180 koperasi, bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 17 Koperasi, kenaikan ini disebabkan karena pengurus koperasi sudah melaksanakan RAT dengan tepat waktu. Realisasi pada tahun 2022 adalah 62,5% dengan capaian 91,20%.
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 70,58% dan realisasinya adalah 65,16% dengan rincian Jumlah koperasi di Kota Dumai berjumlah 310 Koperasi dengan Jumlah Koperasi Aktif berjumlah 202 Koperasi, Koperasi Tidak Aktif berjumlah 108 koperasi sehingga capaian kinerja 92,32%.
apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :
 - Masih ada pengurus koperasi yang belum mentaati/mematuhi ketentuan tentang kelembagaan koperasi.
 - Masih ada pengurus koperasi yang belum menguasai tentang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan koperasi dan manajemen kepengurusan sehingga berdampak kepada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi serta lambatnya pengembangan usaha koperasi.
-
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase Usaha Mikro dan Kecil dengan target pada tahun 2022 adalah 35% berasal dari perhitungan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dibagi dengan Jumlah Seluruh UKM dikali 100.

- b. Pada tahun 2022 Jumlah keseluruhan UMKM di Kota Dumai berjumlah 8.779 UMKM, dan jumlah UMKM yang dibina perkecamatan pada tahun 2022 sebesar 2.264 UMKM, bila dibandingkan dengan tahun 2021 Jumlah UMKM berjumlah 6.515 UMKM mengalami kenaikan sebesar 2.264 UMKM, kenaikan ini di sebabkan oleh banyaknya minat masyarakat untuk berwirausaha baru. Realisasi pada tahun 2022 adalah 62,5% dengan capaian 91,20%.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 45% dan realisasinya adalah 22,13% dengan rincian Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Dumai berjumlah 11.274, dan jumlah UMKM yang dibina perkecamatan pada tahun 2023 sebesar 2.495 UMKM dengan capaian kinerja 49,17%

apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :

- Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya.
- Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas Halal dan izin lainnya (PIRT).
- Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang. Dan dengan adanya serangan pandemi covid 19 telah memicu perubahan perekonomian terutama terhadap bisnis UMKM, bukan hanya pada aspek produksi dan pendapatan saja, namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi.

- 3a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB dengan target pada tahun 2022 adalah 63,9% berasal dari perhitungan Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan Jumlah PDRB dikali 100

- b. Pada tahun 2022 Jumlah sektor pengolahan sebesar 61,80% pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 2,46% pertahun sedangkan PDRB ADHK naik 5,17 tahun 2017 menjadi 7,72% tahun 2022, sehingga kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 63,9% dan realisasinya adalah 12,08% dengan rincian Laju Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) di lihat dari lapangan usaha khususnya industri pengolahan pada tahun 2022 berjumlah 7.72%, dengan capaian kinerja 12,08% apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :
- Tidak adanya atau kurangnya perkembangan dan pertumbuhan usaha baru.
 - Tidak didukung dengan anggaran.
- 4a. Indikator Kinerja Yang ke empat adalah Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin dengan target pada tahun 2022 adalah 9% berasal dari perhitungan Jumlah Kelompok pengrajin yang mendapat Bantuan Binaan pmda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin dikali 100.
- b. Pada tahun 2022 Jumlah ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif adalah decade terakhir menjadi alternative solusi sekaligus strategi global dan pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena sudah banyaknya pelaku usaha meningkatkan kreatifitas disetiap kelurahan Realisasi pada tahun 2022 adalah 0% dengan capaian 0%.

- c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 13% dan realisasinya adalah 4,33% dengan rincian Jumlah pelaku usaha yang dilatih handcraft (lidi sawit) pada tahun 2023 sebesar 10 orang/pelaku usaha dengan realisasi 4,33% capaian kinerja 33,08% apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :
- Kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan.
 - Masih Banyaknya Masyarakat yang terdampak stunting dan kurang mampu.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan (*CUKUP*). Ini dikarenakan ada beberapa indikator kinerja utama yang capaian kinerjanya tidak berhasil disebabkan tidak adanya anggaran yang mendukung indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	73%	65,16%	
		Persentase Usaha Mikro Kecil	58%	22,13%	
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	67%	7.72%	

		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	16%	4.33%	
--	--	---	-----	-------	--

Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Koperasi Aktif sebagai berikut:

Jika dilihat dari jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Dumai dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat baik, pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif berjumlah 190 koperasi, Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif berjumlah 163, pada tahun 2020 koperasi aktif mengalami penurunan disebabkan adanya wabah COVID-19, pada tahun 2021 koperasi aktif berjumlah 163, Pada tahun 2022 koperasi aktif berjumlah 180 Koperasi, dan pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif berjumlah 202 koperasi, pada tahun 2023 koperasi aktif mengalami kenaikan sebanyak 22 Koperasi. Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

- Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan terhadap Koperasi di Kota Dumai agar Rapat Tahunan Anggota secara tepat waktu.
- Mengarahkan Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) agar memonitoring koperasi untuk mengusulkan untuk penerbitan sertifikat nomor induk koperasi

2. Capaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Usaha Mikro dan Kecil sebagai berikut :

Jika dilihat dari jumlah UMKM yang ada di Kota Dumai dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pada tahun 2019 jumlah UMKM berjumlah 16.324 UMKM, pada tahun 2020 jumlah UMKM berjumlah 4.613 UMKM, di tahun 2020 mengalami penurunan ini dikarenakan pada tahun 2020 bidang UMKM menggunakan data SIKP dan banyak UMKM yang mengalami penutupan dikarenakan wabah COVID-19, pada tahun 2021 jumlah UMKM berjumlah 6.515 UMKM, tahun 2022 jumlah UMKM 8.779, dan pada tahun 2023 jumlah UMKM berjumlah 11.274 UMKM mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2023 berjumlah 2.495 UMKM.

Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dengan Memberikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Dumai, memberi dukungan para Pelaku Usaha Mikro agar dapat melanjutkan aktifitas usaha dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro dalam menghadapi dampak Pandemi COVID-19 yang digunakan untuk modal usaha meliputi Pembelian Bahan Baku dan Bahan Penolong, Tempat Usaha, Peralatan, Kemasan, Promosi dan/atau Pemasaran

3. Capaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB sebagai berikut :

Jika dilihat dari Pada tahun 2022 Jumlah sektor pengolahan sebesar 61,80% pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 2,46% pertahun sedangkan PDRB ADHK naik 5,17 tahun 2017 menjadi 7,72% tahun 2022, sehingga kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya, dan indikator tersebut tidak didukung oleh anggaran.

4. Capaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Cakupan Kelompok Pengrajin sebagai berikut :

Jika dilihat dari Pada tahun 2022 Jumlah ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif adalah decade terakhir menjadi alternative solusi sekaligus strategi global dan pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena sudah banyaknya pelaku usaha meningkatkan kreatifitas disetiap kelurahan

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel 3.4.1 berikut :

Tabel 3.4.1
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	62,5%		Isi dengan Ada/ Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	25,79%		
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,56%		
		Persentase Cakupan Kelompok Pengrajin	0%		

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 8.729.827.382 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)* bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar *Rp. 8.672.547.382 (Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)* dan *BELANJA MODAL* sebesar *Rp. 57.280.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar *Rp. 8.392.017.867 (Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)*, terdiri dari Belanja Operasi *Rp. 8.334.737.867 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)* dan Belanja Modal terealisasi *57.280.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.1
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.210.455.282	5.790.388.484	93,24	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	185.128.000	183.965.945	99,37	
		Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	100.000.000	96.725.298	96,73	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.073.834.100	1.855.010.480	89,45	
		Program pengembangan UMKM	130.410.000	130.253.000	99,88	
2	Meningkatkan Perekonomian dan Daya saing daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30.000.000	29.970.000	99,90	

Total anggaran belanja adalah Rp. 8.672.547.382 dengan realisasi Rp. 8.392.017.867. atau dengan capaian sebesar 96,13% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% (apabila tidak mencapai 100%) dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Kurangnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang – bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah
2. Kurangnya Perkembangan perkoperasian di Kota Dumai disebabkan adanya belum paham tentang manfaat dan tujuan dari koperasi, dan kesadaran pengurus serta pengawas atas tugas dan tanggungjawabnya sehingga pengelolaan koperasi menjadi tidak professional, Hal ini terlihat dari naik dan turunnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun.
3. Kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya pada koperasi
4. Kurangnya tenaga teknis pembina koperasi
5. Masih rendahnya SDM dalam pengelolaan usaha yang modern dan berdaya saing
6. Terbatasnya akses pasar yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa
7. Kurangnya promosi hasil produksi UMKM
8. Kurangnya jumlah staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana teknis
9. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang cukup khususnya sarana mobilitas dan peralatan komputer

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera							
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat kota Dumai	Persentase Koperasi Aktif	70,58%	65,16%	92,32%			
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	45%	22,13%	49,17%			
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	100%	100%	100%	6.210.455.282	5.790.388.484	93,24
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	35,5%	36,13%	101,77%	185.128.000	183.965.945	99,37

Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,5%	49,03%	138,11%	100.000.000	96.725.298	96,73
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	15%	13,67%	91.13%	2.073.834.100	1.855.010.480	89,45
Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dibina	4%	4%	100%	130.410.000	130.253.000	99,88
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera							
Sasaran : Meningkatkan Perekonomian dan Daya saing daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	63,90%	7,72%				
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	13%	4,33%	33,08%	-	-	-
Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Terselasaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	75%	40%	53,33%	30.000.000	29.970.000	99,90

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi Aktif yaitu 2* (dua) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran Rp. 185.128.000 dengan realisasi Rp. 183.965.945 atau 99,37% tingkat efisiensinya adalah 102,42 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (101,77%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,37%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT;**

➤ Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran *Rp.185.128.000* dengan realisasi *Rp. 183.965.945* atau 99,37 %

❖ Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar *Rp. 185.128.000* dengan realisasi *Rp. 183.965.945* atau 99,37%. Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran gaji penyuluh atau pendamping koperasi sebanyak 5 (lima) orang yang wilayah kerjanya di 7 (tujuh) kecamatan se Kota Dumai, Pembinaan langsung kepada koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pemeriksaan dan Pengawasan langsung ke lokasi terhadap koperasi di 7 (tujuh) Kecamatan se Kota Dumai sebanyak 56 (lima puluh enam) koperasi, Pembinaan langsung ke lokasi terhadap koperasi sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di 7 (tujuh) Kecamatan se Kota Dumai sebanyak 56 (lima puluh enam) koperasi, dan sosialisasi penguatan kelembagaan kesehatan koperasi tentang perizinan usaha dan perundang-undangan bagi koperasi sektor TKBM dan usaha simpan pinjam sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta dari pengurus/pengelola koperasi.

2. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 96.725.298 atau 96,73% tingkat efisiensinya adalah 142,78 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (138,11%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,73%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;

➤ Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 96.725.298 atau 96,73%

❖ Sub Kegiatan : Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya dengan anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 96.725.298 atau 96,73% . Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelatihan dasar koperasi terhadap pengurus/pengelola koperasi dan pelaku usaha UP2K dibawah binaan PKK Kota Dumai sebanyak 100 (seratus) orang, dan pelatihan teknik Quilting terhadap pengurus/pengelola koperasi dan pelaku usaha UP2K dibawah binaan PKK Kota Dumai sebanyak 52 (lima puluh dua) orang.

b. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Usaha Mikro dan Kecil yaitu 2 (dua)* Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dengan anggaran Rp.2.073.834.100 dengan realisasi Rp.2.013738.540 atau 97,10% tingkat efisiensinya adalah 93,85 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (91.13%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,10%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

➤ Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemiudahan Perizinan, Penguatan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan anggaran Rp. 2.073.834.100 dengan realisasi Rp. 2.013738.540 atau 97,10%

- ❖ Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran *Rp.1.705.474.100* dengan realisasi *Rp. 1.645.650.480* atau 96,49%
- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan usaha mikro dengan anggaran *Rp.159.000.000* dengan realisasi *Rp. 158.728.060* atau 99,83%.
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dengan anggaran *Rp. 209.360.000* dengan realisasi *Rp. 209.360.000* atau 100%.

2. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran *Rp.130.410.000* dengan realisasi anggaran *Rp.130.253.000* atau 99,88% tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIENSI;**

- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Kecil dengan anggaran *Rp.130.410.000* dengan realisasi anggaran *Rp.130.253.000* atau 99,88%.
- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan anggaran *Rp.130.410.000* dengan realisasi anggaran *Rp.130.253.000* atau 99,88%.

d. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB* yaitu tidak ada anggaran yang mendukung indikator tersebut tingkat efisiensinya adalah **0** berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (12,08%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (0%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN;** dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung indikator tersebut.

- d. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 1 (satu) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90% tingkat efisiensinya adalah 33,11 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (33,08%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**;
 - Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90%
 - ❖ Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90%.

6.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.8
Prestasi dan Penghargaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023	Peringkat I Jenis Jasa	Provinsi	Gubernur Riau

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Akuntabilitas kinerja Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai didasarkan pada kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain. Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

- Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif
- Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan
- Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan
- Melakukan koordinasi antar/lintas Perangkat Daerah secara optimal

4.2 PERMASALAHAN

Meskipun secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan, hambatan maupun kekurangan baik yang bersifat khusus dan teknis. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Kurangnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang – bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah.
- Kurangnya Perkembangan perkoperasian di Kota Dumai disebabkan adanya belum paham tentang manfaat dan tujuan dari koperasi, dan kesadaran pengurus serta pengawas atas tugas dan tanggungjawabnya sehingga pengelolaan koperasi menjadi tidak professional, Hal ini terlihat dari naik dan turunnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun;

- Kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya pada koperasi;
- Kurangnya tenaga teknis pembina koperasi;
- Masih rendahnya SDM dalam pengelolaan usaha yang modern dan berdaya saing;
- Terbatasnya akses pasar yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa;
- Kurangnya promosi hasil produksi UMKM;
- Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan;
- Kurangnya jumlah staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana teknis;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang cukup khususnya sarana mobilitas dan peralatan komputer.

4.3. LANGKAH STRATEGIS

Meningkatkan kualitas berkesinambungan dengan konsolidasi pejabat terkait secara konsisten dengan lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Perindustrian. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah :

- Memperluas akses pasar produk dan jasa seperti digitalisasi UMKM. Pada era saat ini digitalisasi sangatlah penting artinya. Karena banyak dari masyarakat pengguna media sosial sehingga UMKM dapat mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Penguatan sistem logistic nasional untuk memudahkan arus barang UMKM, membangun sentra-sentra UMKM.
- Akselerasi pembiayaan dan Investasi
Dapat dilakukan dengan kemitraan dengan usaha besar sebagai offtaker maupun avails, pelibatan fintech dalam pembiayaan UMKM, mengoptimalkan pembiayaan KSP, KUR khusus dan inventasi, CSR BUMN dan pembiayaan non bank.

- Mempermudah dan memberikan kesempatan berusaha kepada UMKM dapat berupa kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, penempatan produk UMKM di mall dan e-commerce dan produk UMKM masuk ke dalam e-catalogue
- Meningkatkan daya saing produk dan jasa UMKM yang ada
- Pengembangan kapasitas manajemen SDM
- Peningkatan kuantitas, kualitas dan konsistensi Produk Industri menuju industry yang berstandarisasi
- Strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online
- Peningkatan Koperasi aktif dan sehat
- Peningkatan Kualitas UMKM

Disarankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan evaluasi serta pengendalian secara rutin, serta pengawasan yang berkesinambungan, sehingga apabila muncul kendala segera dapat dicari solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si**
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
NIP. 19740925 199502 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2023
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	%	70.58
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	45
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	64
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	13

1 Sasaran 1

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 94.847.200

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota Rp. 94.847.200

1.1 Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota Rp. 94.847.200

2 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 100.000.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp. 100.000.000

2.1 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Rp. 100.000.000

**Program
Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha
Mikro (UMKM)**

Rp. 480.146.080

**Pemberdayaan Usaha
Mikro yang
dilakukan melalui
pendataan,
kemitraan,
kemudahan
perizinan, penguatan
kelembagaan dan
koordinasi dengan
para Pemangku
kepentingan**

Rp. 480.146.080

3.1 Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro Rp. 90.786.080

3.2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Rp. 180.000.000

3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Rp. 209.360.000

2 Sasaran 2

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah

**Program
Perencanaan Dan
Pembangunan
Industri**

Rp. 30.000.000

**Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota**

Rp. 30.000.000

4.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Rp. 30.000.000

JUMLAH Rp. 704.993.280



WALIKOTA DUMAI,

H. PAIKAL, SKM, MARS



Dumai, Januari 2023

KEPALA,

SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
NIP. 19740925 199502 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023



PIHAK PERTAMA


SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
NIP. 19740925 199502 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	%	70,58
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	45
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian	Persentase kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	63,9
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	13

Sasaran 1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	185.128.000
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Rp.	185.128.000
		1.1	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Rp.	185.128.000
		2	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp.	100.000.000
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000
		2.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp.	100.000.000
		3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2.073.834.100
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku kepentingan	Rp.	2.073.834.100
		3.1	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Rp.	1.705.474.100
		3.2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp.	159.000.000
		3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp.	209.360.000
		4.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	130.410.000
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp.	130.410.000
		4.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp.	130.410.000

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah



5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	30.000.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp.	30.000.000
5.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp.	30.000.000
	Jumlah	Rp.	2.519.372.100

Dumai, 25 September 2023

Pihak Pertama
KEPALA


SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu

MISI : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri

SASARAN : 1. Meningkatnya Perekonomian dan Daya saing daerah
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGE T					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KET
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri dibagi jumlah PDRB di kali 100		59,9	61,9	63,9	65,9	66,2	67	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri dibagi jumlah PDRB di kali 100		59,9	61,9	63,9	65,9	66,2	67	Peningkatan Perekonomian kota Melalui Optimalisasi peran seluruh stake holder	Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan	➤ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ➤ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL ➤ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
											Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Jumlah Kelompok Pengrajin Yang Mendapat Bantuan Binaan Pemda Tanun N dibagi Jumlah kelompok pengrajin di kali 100		4	9	13	14	15	16					
Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi Aktif di bagi Jumlah seluruh koperasi di kali 100		68,53	68,53	70,58	71	72	73	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	Jumlah Koperasi Aktif di bagi Jumlah seluruh koperasi di kali 100		68,53	68,53	70,58	71	72	73	Peningkatan Produktivitas masyarakat	➤ Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM ➤ Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan ➤ Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha	➤ PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI ➤ PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI ➤ PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN ➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN		

[illegible]

Dumai,Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI

SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$	70,58%	65,16%	92,32%
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh UKM}}$	45 %	22,13%	49,17%
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri} \times 100}{\text{Jumlah PDRB}}$	63,9%	7,72%	12,08%
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin Yang Mendapat Bantuan Binaan Pemda Tanun} \times 100}{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin}}$	13%	4.33%	33,31%

Pagu anggaran tahun 2023 : Rp. 8.729.827.382

Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp. 8.392.017.867

Persentase Capaian Program Tahun 2023 : 99,79%

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)		(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	%	70,58
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	45
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	64
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	13

Dumai, Januari 2023

Pihak Pertama
KEPALA


SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020
TRIMULAN IV
KOTA DUMAI

No	Sasaran RPJPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJPD Tahun 2022	Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 yang direalisasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang direalisasi (2022)				Target Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD and Tahun 2022/Alat Tahun Pelaksanaan RPJPD Tahun 2022				Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD and Tahun 2022 (%)	RPJPD Perangko/awak	Harapan/berada	Tindak Lanjut		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
				a	Ap	a	Ap	x	Ap	x	Ap	x	Ap	x	Ap	x	Ap	x	Ap	x					
		Siswa Riting																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN FIKSIKSTANAN DAERAH KABUPATEN KOTA						6.216.487,35	1.547.346,03	1.644.737,38	1.254.966,10	1.789.885,47	9.837.365,84	95,8%		9.791.986,44	9,8%								
		Pemenuhan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.883.700	7.475.300		7.444.800	1.243.500	16.165.800	95,0%		16.165.800	9,0%								
		koordinasi dan Penyelesaian Dokumen RPA-GDPT	Jumlah Dokumen RPA - GDPT dan laporan hasil koordinasi Penyelesaian Dokumen RPA-GDPT	0,0%	-	0,0%	-	2.688.800			1,0%	2.380.000		1	2.380.000	100,0%	91,5%	1,0%	2.380.000	0,0%	0,0%			Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		koordinasi dan Penyelesaian Dokumen Perbaikan RPA-GDPT	Jumlah Dokumen Perbaikan RPA- GDPT dan laporan hasil koordinasi Penyelesaian Dokumen Perbaikan RPA- GDPT	0,0%	-	0,0%	-	2.610.400			1,0%	2.380.000		1	2.380.000	100,0%	90,8%	1,0%	2.380.000	0,0%	0,0%			Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		koordinasi dan Penyelesaian Dokumen DFA-GDPT	Jumlah Dokumen DFA - GDPT dan laporan hasil koordinasi Penyelesaian Dokumen DFA-GDPT	0,0%	-	0,0%	-	2.452.400	1,0%	1.420.000		480.000	410.000	1	2.310.000	100,0%	94,4%	1,0%	2.310.000	0,0%	0,0%			Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		koordinasi dan Penyelesaian Dokumen Perbaikan DFA-GDPT	Jumlah Dokumen Perbaikan DFA- GDPT dan laporan hasil koordinasi Penyelesaian Dokumen Perbaikan DFA- GDPT	0,0%	-	0,0%	-	2.452.400			1,0%	2.325.000		1	2.325.000	100,0%	90,7%	1,0%	2.325.000	0,0%	0,0%			Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		koordinasi dan Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RPJPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RPJPD dan laporan hasil koordinasi Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja RPJPD	0,0%	-	0,0%	-	6.070.000	3,0%	6.020.000			635.000	2	6.000.000	100,0%	98,8%	3,0%	6.000.000	0,0%	0,0%			Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.598.238,84	740.883,27	1.381.084,45	910.079,91	1.210.833,40	4.354.794,04	94,4%		4.354.794,04	9,0%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0,0%	-	0,0%	-	4.459.000.442	3,0%	736.103,27	0,0%	1.386.022,25	3,0%	912.290.919	3	1.182.943,82	14	4.336.103,34	100,0%	94,3%	14,0%	4.336.103,34	0,0%	0,0%	Tidak Ada Kegiatan telah selesai.
		koordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD dan laporan hasil koordinasi Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir tahun RPJPD	0,0%	-	0,0%	-	3.747.000				1	3.540.000	1	3.540.000	100,0%	94,73%	1,0%	3.540.000	0,0%	0,0%			Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		koordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Buku/Tetapan/Emas/Rendah RPJPD dan laporan hasil koordinasi Penyelesaian Laporan Keuangan Buku/Tetapan/Emas/Rendah RPJPD	Jumlah Laporan Keuangan Buku/Tetapan/Emas/Rendah RPJPD dan laporan hasil koordinasi Penyelesaian Laporan Keuangan Buku/Tetapan/Emas/Rendah RPJPD	0,0%	-	0,0%	-	43.142.000	0,25	6.020.000	0,50	10.362.000	0,25	6.020.000	13.840.000	1	43.142.000	100,0%	98,3%	1,0%	43.142.000	0,0%	0,0%	Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						27.188.575	4.060.000	8.025.300	4.000.400	8.196.800	26.833.800	98,71%		26.833.800	9,0%								
		Penyediaan Barang Milik Daerah pada RPJPD	Jumlah Laporan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah pada RPJPD	0,0%	-	0,0%	-	27.188.575	0,25	4.060.000	0,50	8.025.300	0,25	4.000.400	8.190.000	1	26.833.800	100,0%	98,71%	1,0%	26.833.800	0,0%	0,0%	Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		Administrasi Usaha Perangko Daerah						377.885.830	86.107.600	46.266.300	66.626.300	173.071.400	377.884.600	98,01%		385.987.200	9,0%								
		Penyediaan Komponen Indeks Jarak/Persebaran Jaringan Kantor yang di sediakan	Jumlah Paket Komponen Indeks Jarak/Persebaran Jaringan Kantor yang di sediakan	0,0%	-	0,0%	-	10.468.000	0,25	1.985.000	0,25	1.025.000	0,25	1.984.000	4.950.000	1	10.464.000	100,0%	98,71%	1,0%	10.464.000	0,0%	0,0%	Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		Penyediaan Fasilitas dan Perawatan Fasilitas Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Perawatan kantor yang disediakan	0,0%	-	0,0%	-	86.267.800	0,25	16.216.000	0,25	16.211.000	0,25	16.222.000	17.267.700	1	86.266.800	100,0%	98,8%	1,0%	86.266.800	0,0%	0,0%	Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	
		Penyediaan Fasilitas Rumah Tinggal	Jumlah Paket Fasilitas rumah tinggal yang disediakan	0,0%	-	0,0%	-	21.816.000	0,25	4.722.400	0,25	4.370.700	0,25	6.016.400	6.188.400	1	21.816.000	100,0%	98,8%	1,0%	21.816.000	0,0%	0,0%	Tidak Ada Kegiatan telah selesai.	

Link Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

https://drive.google.com/file/d/1IBLPvUBkpqrBtUOXkwjgYbjygg5zzxXZB/view?usp=drive_link



GUBERNUR RIAU

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan ini diberikan kepada :

KOPERASI JASA PEKERJA PUTRI TUJUH

68/BH/INDAGKOP/KOP/III/2003

AHU-0000474.AH.01.38.TAHUN 2022

Peringkat I

Jenis Jasa

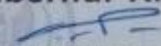
Jl. Sei Gerong No. BQ 02-03 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan

KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI RIAU

TAHUN 2023

Pekanbaru, September 2023

Gubernur Riau


SYAMSUAR